

Sistem Pelaporan Elektronik Produksi dan Distribusi Kefarmasian

OUTLINE

1. Pendahuluan
2. Tujuan
3. Ruang Lingkup
4. SIPNAP dan e-report PBF
5. Penutup

Pendahuluan

Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Pasal 14 ayat (2)

Industri farmasi, PBF, Sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, Puskesmas, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan wajib membuat, menyampaikan dan menyimpan laporan berkala mengenai pemasukan dan / atau pengeluaran narkotika yang berada dalam penguasaannya.

Undang-undang No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika

Pasal 33 ayat (1)

Pabrik obat, PBF, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, Puskesmas, balai pengobatan, dokter, lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan wajib membuat dan menyimpan catatan mengenai kegiatan masing-masing yang berhubungan dengan psikotropika.

Pasal 34 ayat (1)

Pabrik obat, pedagang besar farmasi, apotek, rumah sakit, puskesmas, lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan wajib melaporkan catatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) kepada Menteri secara berkala.

Pendahuluan (lanjutan)

Permenkes No. 1148 Tahun 2011 tentang Pedagang Besar Farmasi

Pasal 30 ayat (1)

Setiap PBF dan cabangnya wajib menyampaikan laporan kegiatan setiap 3 (tiga) bulan sekali meliputi kegiatan penerimaan dan penyaluran obat dan/atau bahan obat kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Kepala Badan, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, dan Kepala Balai POM..

Permenkes No. 10 Tahun 2013 tentang Impor dan Ekspor Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi

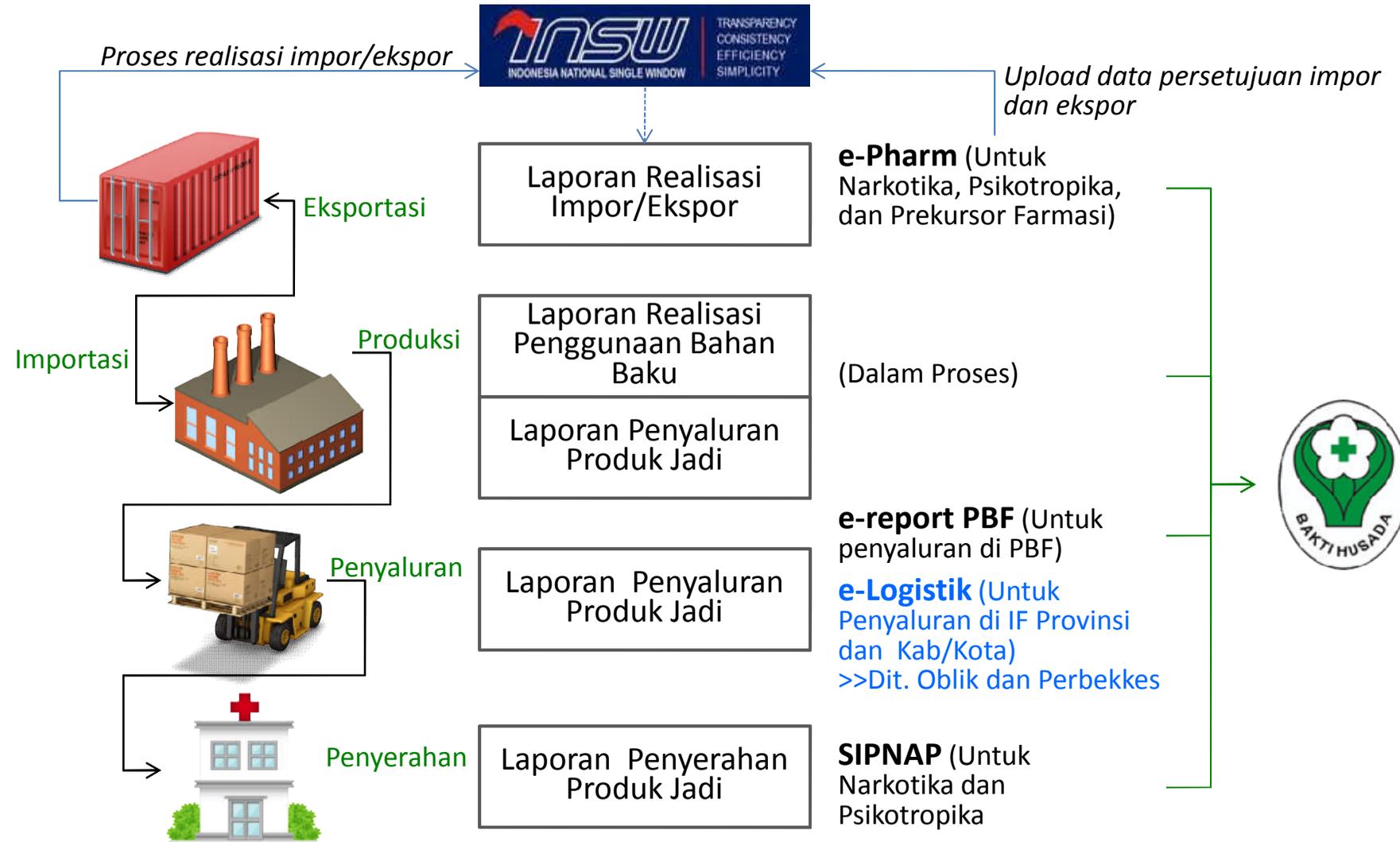
Pasal 32 ayat (2)

Importir/Eksportir wajib menyampaikan laporan realisasi impor/ekspor psikotropika dan/atau prekursor farmasi kepada Direktur Jenderal setiap kali impor/eskpor.

Tujuan

1. Memperoleh data yang valid dan *real-time* dalam proses pengambilan keputusan dan penentuan kebijakan;
2. Memudahkan dalam memonitor kemungkinan adanya penyimpangan/kebocoran ke jalur ilegal untuk obat dalam pengawasan;
3. Memudahkan dalam melakukan analisa dan penyusunan laporan;
4. Laporan yang *paper-less*, terpusat, mudah diakses, dan didistribusikan.

Ruang Lingkup



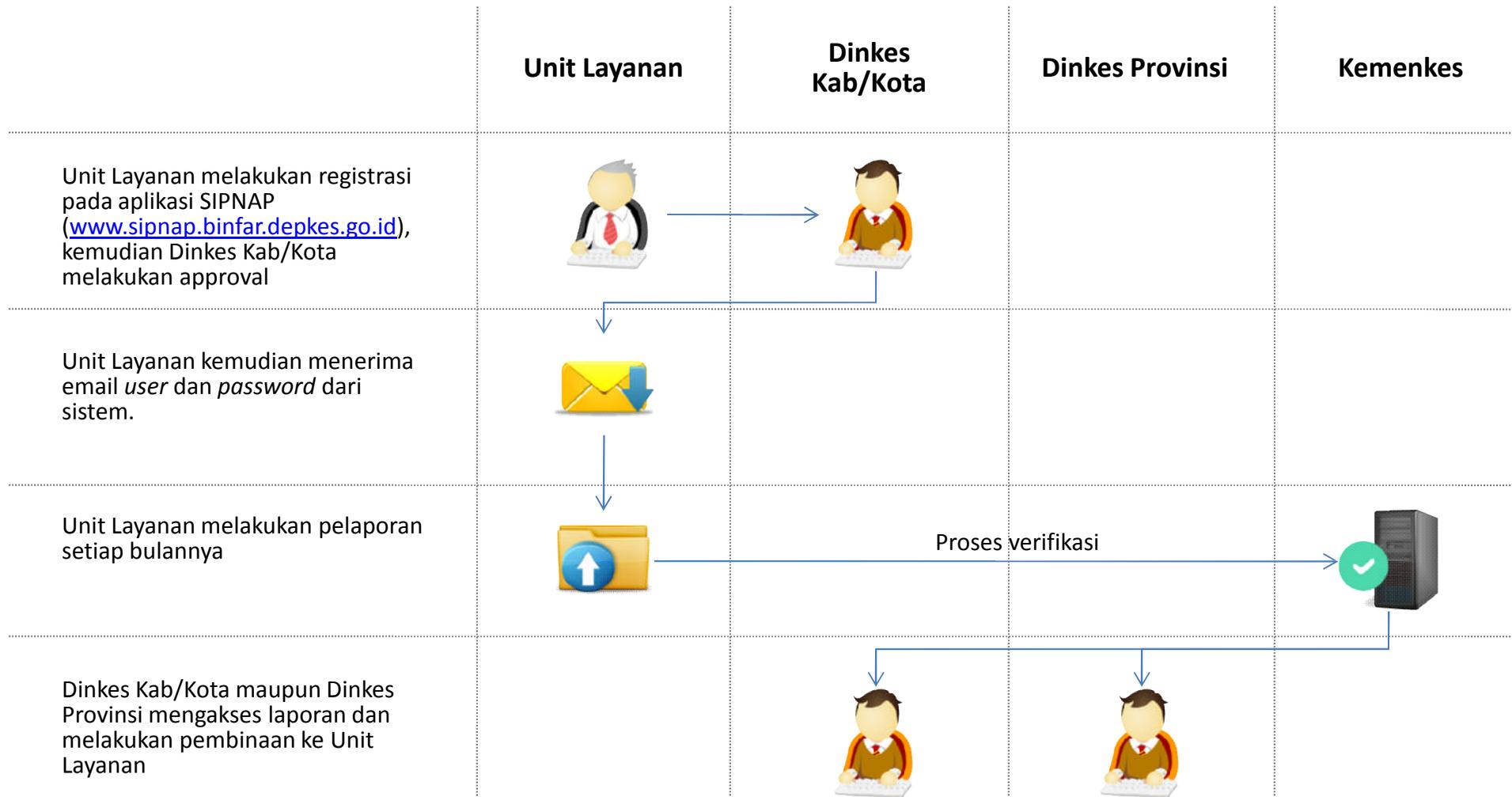
SIPNAP dan e-report PBF

SIPNAP Sistem pelaporan produk jadi golongan narkotika dan psikotropika yang ditujukan bagi unit layanan

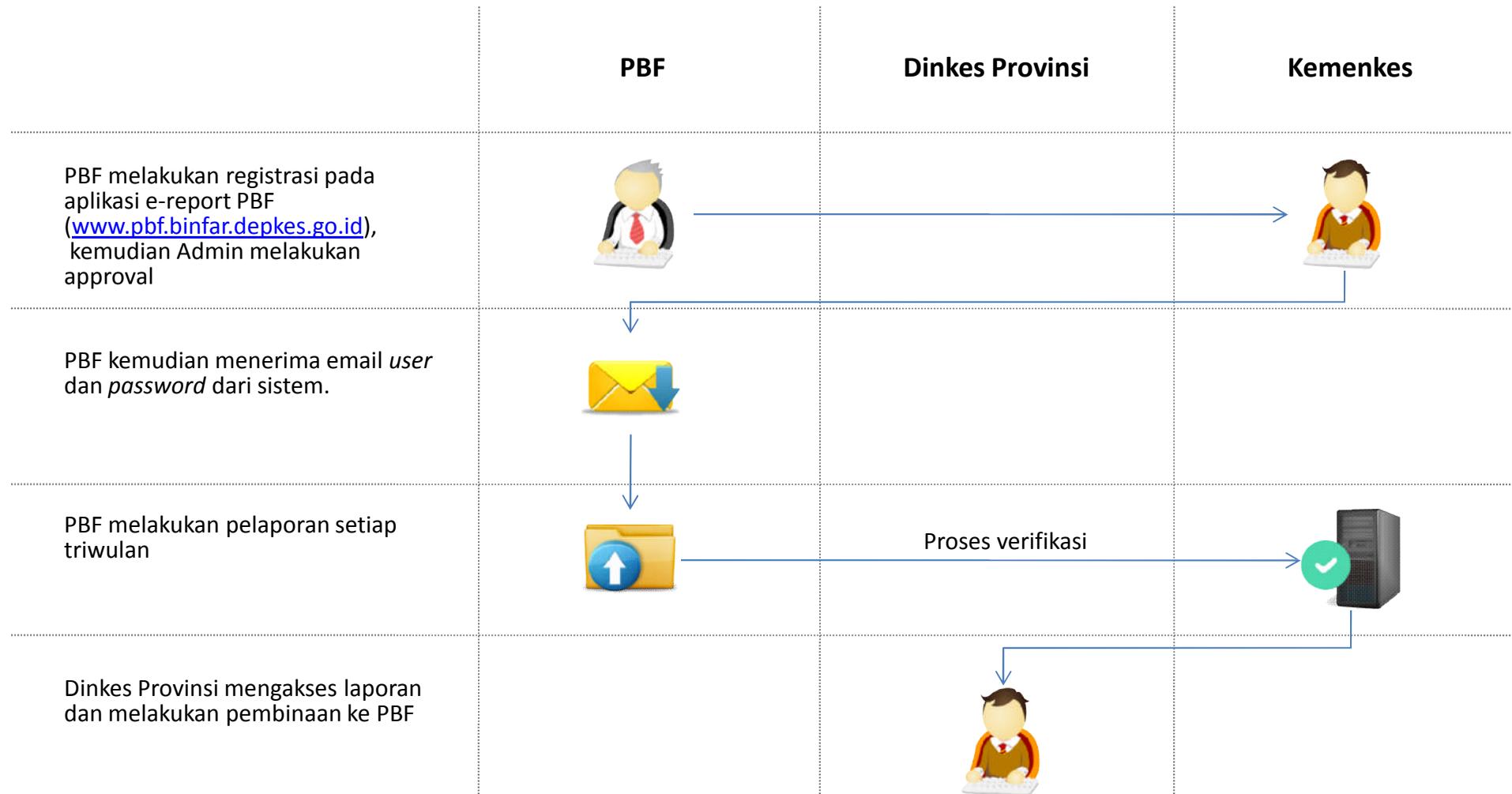
e-report PBF Sistem pelaporan penyaluran produk jadi yang ditujukan bagi Pedagang Besar Farmasi (PBF)

Alur Pelaporan

Alur Pelaporan SIPNAP



Alur Pelaporan e-report PBF



Sistem Informasi Pelaporan Penggunaan Sediaan Jadi Narkotika & Psikotropika Nasional

SELAMAT DATANG

Aplikasi Sistem Pelaporan Narkotika dan Psikotropika (SIPNAP) dikembangkan dan dikelola oleh Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian, Ditjen Binfar dan Alkes, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Aplikasi ini diperuntukkan bagi seluruh Unit Pelayanan, Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Dinas Kesehatan Provinsi Seluruh Indonesia.

LOGIN

Silahkan login dengan memasukkan User ID dan Password yang Anda miliki, atau pilih menu Registrasi jika Anda belum memiliki User ID dan Password.

User ID *

Password *

Key Code

Login

STATISTIK PENGUNJUNG

- 5 Tamu dan 30 Anggota yang Online saat ini
- 1205 Pengunjung hari ini
- 37188 Pengunjung bulan ini
- 984636 Pengunjung sejak Januari 2014

STATISTIK AKSES APLIKASI

- 300000 DKI Jakarta - 30%
- 200000 Jawa Timur - 20%
- 100000 Jawa Tengah - 10%
- 100000 Jawa Barat - 10%
- 100000 Sumatera Utara - 10%
- 100000 Sumatera Barat - 10%
- 100000 Sulawesi Selatan - 10%
- 100000 Sulawesi Tengah - 10%
- 100000 Sulawesi Tenggara - 10%
- 100000 Sulawesi Utara - 10%
- 100000 Kalimantan Barat - 10%
- 100000 Kalimantan Selatan - 10%
- 100000 Kalimantan Tengah - 10%
- 100000 Kalimantan Timur - 10%
- 100000 Kalimantan Utara - 10%
- 100000 Maluku - 10%
- 100000 Maluku Utara - 10%
- 100000 Papua - 10%
- 100000 Papua Barat - 10%
- 100000 Papua Barat Daya - 10%
- 100000 Papua Selatan - 10%
- 100000 Papua Tengah - 10%
- 100000 Papua Utara - 10%
- 100000 Papua Barat Daya - 10%
- 100000 Papua Selatan - 10%
- 100000 Papua Tengah - 10%
- 100000 Papua Utara - 10%

BERITA & PENGUMUMAN

sad

sad - Selengkapnya...

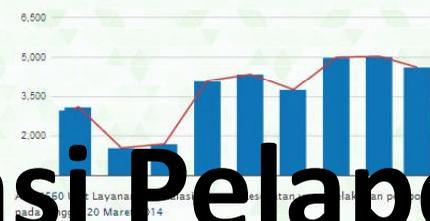
Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian, 2014-04-22 14:14:56 - Dilihat 1 Kali

Menkes Buka Rakerkesnas 2014 Regional Barat di Jakarta

Rakerkesnas 2014 merupakan kesempatan besar untuk melihat kembali apa saja yang sudah disepakati pada Rakerkesnas tahun sebelumnya - Selengkapnya...

Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian, 2014-04-18 17:48:53 - Dilihat 6 Kali

STATISTIK PELAPORAN UNIT LAYANAN



Evaluasi Pelaporan Tahun 2013

Sistem Pelaporan Elektronik Pedagang Besar Farmasi

SELAMAT DATANG

...

LOGIN

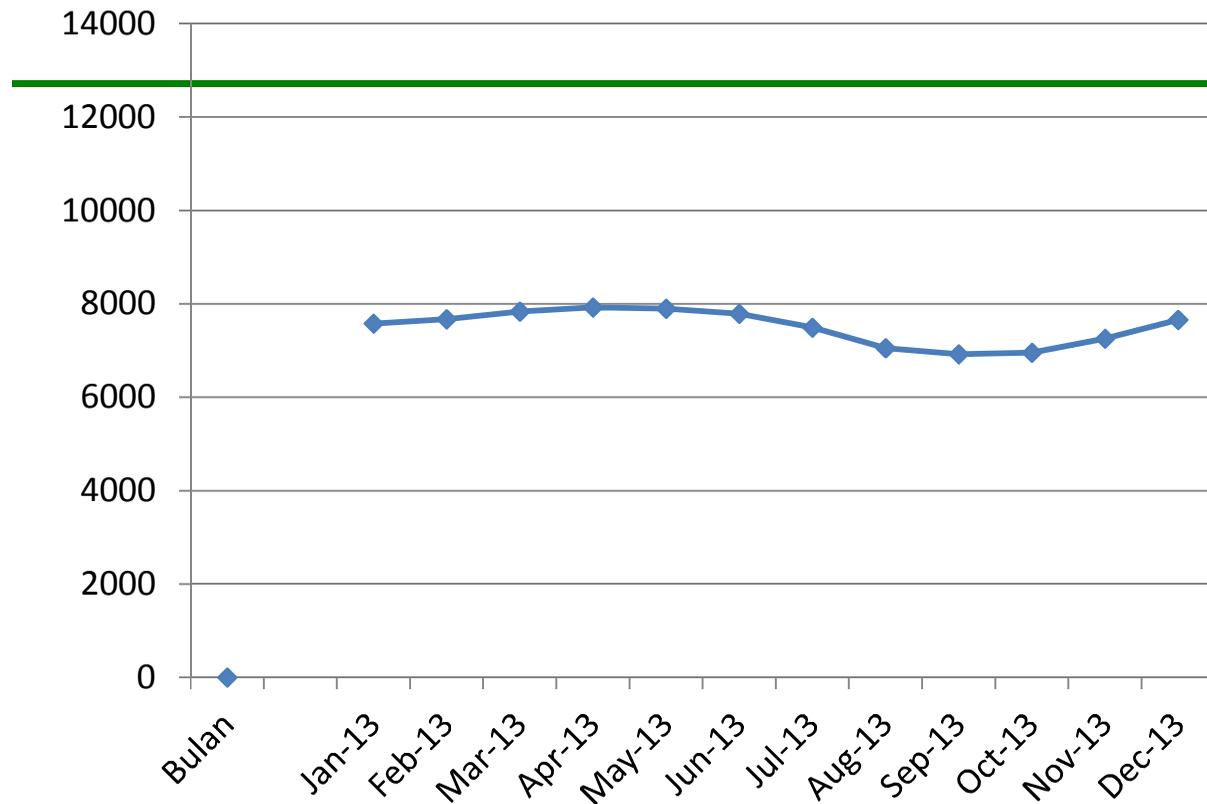
Silahkan login dengan memasukkan User ID dan Password yang Anda miliki, atau pilih menu Registrasi jika Anda belum memiliki User ID dan Password.

Login

✘ Kode yang Anda Masukan Salah

Rapat Konsultasi Teknis
 Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Kefar
 2014

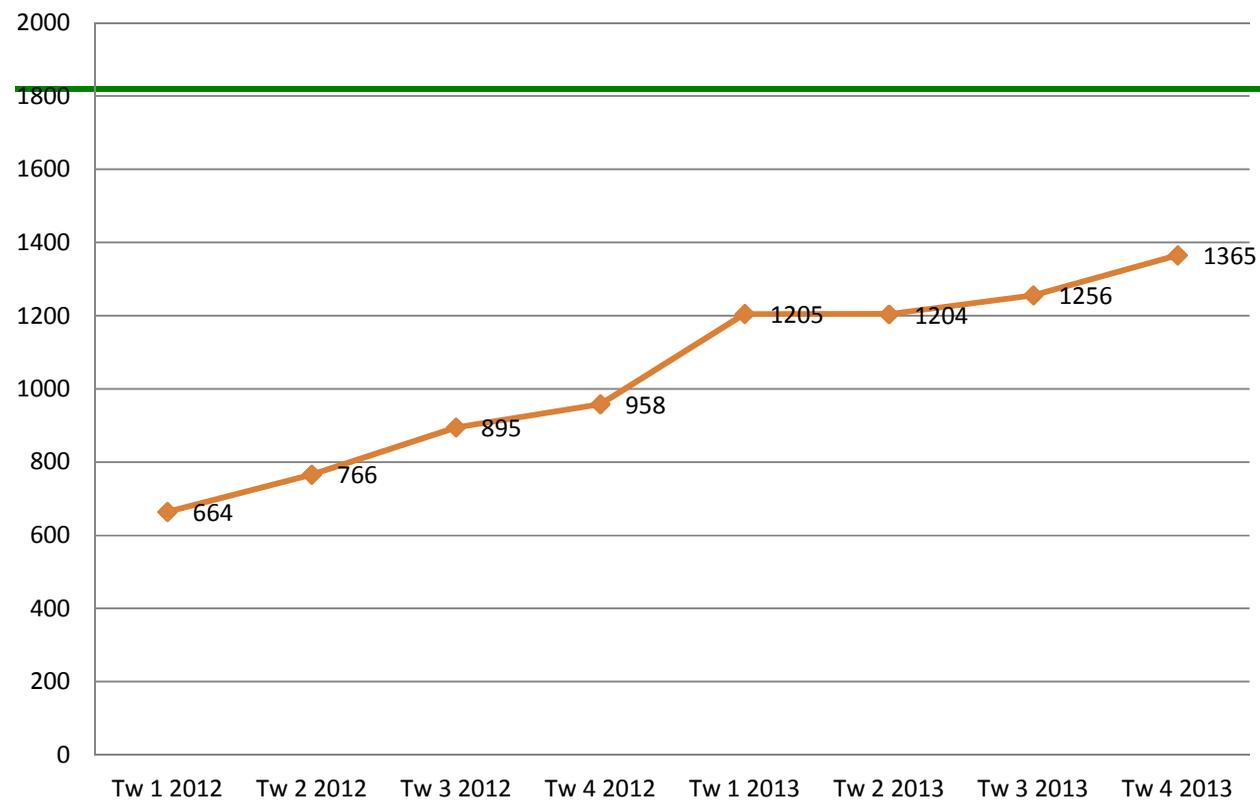
Pelaporan SIPNAP tahun 2013



Unit Layanan yang terdaftar adalah **12.883 unit layanan**, terdiri dari 11.526 apotek, 1.091 RS, 229 Klinik, dan 37 PKM BLUD

Rata-rata unit layanan yang melapor selama tahun 2013 adalah **67,35%**

Pelaporan e-report PBF tahun 2012-2013



PBF yang terdaftar adalah **1.814 PBF**, terdiri dari 816 PBF Pusat dan 998 PBF cabang

Rata-rata PBF yang melapor selama tahun 2013 adalah **69,32%**

Permasalahan dan Peran Daerah

Masalah	Peran Daerah	Output bagi Daerah
Sarana tidak tersosialisasi.	Sosialisasi dan edukasi berkelanjutan.	100 % Jumlah sarana melapor.
Tingkat kepatuhan melapor rendah.	Pembinaan terkait pekerjaan kefarmasian.	Kepatuhan melapor meningkat.
Utilisasi hasil pelaporan oleh petugas.	Penggunaan aplikasi sebagai salah satu instrumen pembinaan.	Data untuk penyusunan laporan dan pengambilan keputusan.
Validitas hasil pelaporan.	<ul style="list-style-type: none">• Mendorong sarana untuk melakukan pelaporan.• Pemeliharaan database aplikasi.	<ul style="list-style-type: none">• Data pelaporan yang valid dan <i>real-time</i>.• Database sarana dan penanggung jawab.

Penutup

1. Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan komitmen melakukan upaya pengembangan dan perbaikan untuk menjamin berjalannya sistem pelaporan elektronik.
2. Dengan pelaporan elektronik, diharapkan proses pelaporan menjadi cepat dan tepat waktu, kualitas dan kuantitas pelaporan meningkat, sehingga diperoleh data yang representatif, akurat, dan valid untuk pengambilan keputusan atau perubahan kebijakan tentang sediaan farmasi.

www.pbf.binfar.depkes.go.id Kementerian Kesehatan
e-report PBF Direktorat Jenderal Binfar dan Alkes
Sistem Pelaporan Triwulan PBF
www.sipnap.binfar.depkes.go.id SIPNAP
Sistem Pelaporan Narkotika dan Psikotropika **Terima Kasih**